



## DINAMIKA KEKUASAAN DALAM WACANA POLITIK PADA DIALOG NAJWA SHIHAB DAN PRABOWO SUBIANTO TENTANG RUU POLRI

Ruly Aprilia Radianti

Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan  
Universitas Ma'arif Nahdlatul Ulama Kebumen

---

**Abstract:** Artikel ini mengkaji dinamika kekuasaan yang tercermin dalam wacana politik melalui dialog antara Najwa Shihab dan Prabowo Subianto dalam program *Mata Najwa* yang membahas Rancangan Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia (RUU Polri). Media talkshow politik tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi, tetapi juga menjadi ruang interaksi simbolik antara negara dan masyarakat. Bahasa yang digunakan dalam dialog politik memuat kepentingan, strategi, serta relasi kuasa tertentu. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode Analisis Wacana Kritis model Norman Fairclough yang mencakup analisis teks, praktik diskursif, dan praktik sosial. Data diperoleh dari transkrip dialog yang ditayangkan melalui kanal resmi Narasi TV. Hasil penelitian menunjukkan bahwa relasi kekuasaan tampak melalui pemilihan dixi, pola argumentasi, strategi menjawab pertanyaan, serta pengendalian topik pembahasan. Najwa Shihab berperan sebagai representasi suara publik yang kritis, sedangkan Prabowo Subianto merepresentasikan kepentingan negara melalui narasi stabilitas dan keamanan. Interaksi keduanya memperlihatkan bahwa kekuasaan dalam wacana bersifat dinamis dan dinegosiasikan melalui bahasa. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman kritis masyarakat terhadap praktik komunikasi politik di media.

**Keywords:** **wacana politik, kekuasaan, analisis wacana kritis, talkshow politik, RUU Polri**

### PENDAHULUAN

Perkembangan media massa pada era keterbukaan informasi membawa perubahan signifikan dalam cara masyarakat memahami isu politik. Media tidak lagi berperan semata-mata sebagai penyampai informasi, melainkan turut membentuk cara pandang publik terhadap realitas sosial dan kebijakan negara. Salah satu bentuk media yang memiliki pengaruh besar dalam pembentukan opini publik adalah talkshow politik yang menghadirkan dialog langsung antara pejabat negara dan jurnalis.

Program *Mata Najwa* dikenal sebagai ruang diskusi politik yang menempatkan jurnalis dalam posisi aktif dan kritis. Dialog antara Najwa Shihab dan Prabowo Subianto mengenai RUU Polri menjadi peristiwa diskursif yang menarik karena menyangkut isu sensitif terkait kewenangan aparat negara, pengawasan, serta partisipasi publik. Isu RUU Polri memunculkan kekhawatiran masyarakat sipil karena dinilai berpotensi memperluas kewenangan kepolisian tanpa diimbangi mekanisme pengawasan yang memadai.

Bahasa yang digunakan dalam wacana politik tidak bersifat netral. Setiap pernyataan, pilihan kata, dan struktur kalimat mengandung kepentingan tertentu serta mencerminkan relasi kuasa yang bekerja di dalamnya. Oleh karena itu, analisis terhadap dialog politik perlu dilakukan secara kritis untuk mengungkap bagaimana kekuasaan diproduksi dan dinegosiasikan melalui bahasa. Pendekatan Analisis Wacana Kritis dipandang relevan untuk menelaah praktik komunikasi politik dalam media.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk mengkaji dinamika kekuasaan dalam dialog Najwa Shihab dan Prabowo Subianto tentang RUU Polri dengan menggunakan kerangka Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam studi bahasa dan media, sekaligus meningkatkan literasi kritis masyarakat terhadap wacana politik.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan fokus pada pemaknaan dan interpretasi bahasa dalam konteks sosial-politik. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti menggali makna di balik penggunaan bahasa serta mengaitkannya dengan relasi kekuasaan yang lebih luas. Metode yang digunakan adalah Analisis Wacana Kritis model Norman Fairclough yang mencakup tiga dimensi, yaitu analisis teks, praktik diskursif, dan praktik sosial.

Data utama penelitian berupa transkrip dialog antara Najwa Shihab dan Prabowo Subianto yang ditayangkan dalam program *Mata Najwa* melalui kanal resmi Narasi TV. Data pendukung diperoleh dari buku dan artikel ilmiah yang relevan dengan kajian wacana, media, dan politik. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi dan simak-catat. Keabsahan data dijaga melalui ketekunan analisis dan triangulasi sumber.

## HASIL dan PEMBAHASAN

Bagian hasil dan pembahasan ini disusun secara mendalam dan naratif untuk menggambarkan secara utuh dinamika kekuasaan yang terjadi dalam dialog antara Najwa Shihab dan Prabowo Subianto terkait pembahasan RUU Polri. Pembahasan tidak hanya memaparkan data dialog, tetapi juga mengaitkannya dengan konteks sosial-politik serta kerangka Analisis Wacana Kritis. Dengan demikian, hasil penelitian ini tidak berdiri sebagai deskripsi semata, melainkan sebagai analisis interpretatif yang menjelaskan bagaimana bahasa bekerja sebagai sarana produksi dan negosiasi kekuasaan di ruang publik.

### Penyajian Data Dialog dan Konteks Percakapan

Untuk memperkuat validitas analisis, bagian ini menyertakan bukti transkrip wawancara secara langsung sebagai data penelitian. Transkrip disajikan secara

selektif pada bagian-bagian yang merepresentasikan dinamika kekuasaan dan pertarungan wacana antara jurnalis dan aktor negara.

Dalam dialog awal, Najwa Shihab menyampaikan kritik yang merepresentasikan kegelisahan masyarakat sipil sebagai berikut:

*"Ada kekhawatiran dari masyarakat sipil, Pak. Proses pembentukan undang-undang kita makin jauh dari rakyat. Tidak ada partisipasi publik yang bermakna. Terutama jika kita melihat RUU Polri, RUU Kejaksaan, hingga RUU Penyiaran. Polanya mirip, kewenangan aparat negara diperbesar, sementara peran warga negara diperkecil."*

Transkrip tersebut menunjukkan bahwa Najwa tidak langsung mengajukan pertanyaan normatif, melainkan membangun konteks sosial terlebih dahulu. Strategi ini bertujuan memperkuat legitimasi kritik dengan menjadikannya sebagai suara kolektif masyarakat, bukan opini personal jurnalis.

Najwa kemudian memperjelas fokus pertanyaannya dengan mengatakan:

*"Saya ingin tahu pendapat Bapak sebagai Presiden. Apakah Bapak setuju polisi perlu diperluas kewenangannya, atau justru pengawasannya yang harus diperkuat karena banyaknya kasus penyalahgunaan kekuasaan?"*

Pertanyaan ini secara eksplisit menempatkan presiden pada posisi untuk memilih antara dua kepentingan yang berlawanan, yaitu perluasan kewenangan atau penguatan pengawasan.

Menanggapi pertanyaan tersebut, Prabowo Subianto menyampaikan pernyataan berikut:

*"Pada prinsipnya, polisi harus diberi wewenang yang cukup untuk melaksanakan tugasnya. Kalau sudah diberi wewenang yang cukup, ya kenapa harus ditambah. Ini tinggal kita menilai secara arif dan proporsional."*

Pernyataan ini menunjukkan upaya Prabowo untuk menjaga posisi moderat dan menghindari jawaban yang bersifat ekstrem. Bahasa yang digunakan bersifat normatif dan menekankan rasionalitas kebijakan.

Dialog berlanjut ketika Najwa kembali menekan isu indikator pengambilan tindakan terhadap aparat:

*"Bapak tadi mengatakan akan mengambil tindakan jika diperlukan. Ukurannya apa, Pak? Apakah berbagai kasus yang terjadi belakangan ini belum cukup untuk menjadi indikator?"*

Prabowo kemudian menjawab dengan menyebutkan indikator kinerja aparat sebagai berikut:

*"Saya akan melihat apakah penyelundupan narkoba berkurang, apakah penyelundupan barang-barang terlarang berkurang. Itu indikator yang saya*

*sampaikan kepada semua aparat penegak hukum."*

Selain itu, dialog juga menyinggung persoalan transparansi draf undang-undang. Prabowo menyatakan bahwa ke depan naskah resmi perlu dibuka kepada publik agar tidak menimbulkan kesimpangsiuran informasi. Pernyataan ini menjadi bagian penting dalam analisis karena menunjukkan adanya respons negara terhadap tekanan publik.

Penyajian transkrip ini memperlihatkan bahwa dialog tidak berlangsung secara satu arah. Terjadi proses saling menekan, merespons, dan menegosiasikan makna antara jurnalis dan aktor negara dalam ruang publik media.

#### **Analisis Dimensi Teks: Pilihan Bahasa dan Strategi Retoris: Pilihan Bahasa dan Strategi Retoris**

Pada dimensi teks, perbedaan pilihan bahasa antara Najwa Shihab dan Prabowo Subianto tampak sangat jelas. Najwa menggunakan bahasa yang bersifat evaluatif, reflektif, dan kritis. Penggunaan frasa seperti *kekhawatiran masyarakat sipil, partisipasi publik yang tidak bermakna*, dan *penyalahgunaan kekuasaan* berfungsi untuk membangun narasi masalah dan menempatkan kebijakan negara sebagai objek evaluasi.

Bahasa Najwa tidak disampaikan secara emosional, melainkan disusun secara argumentatif dan sistematis. Strategi ini menunjukkan bahwa kekuatan wacana jurnalis terletak pada kemampuan merumuskan kritik secara rasional dan berbasis fakta sosial. Dengan cara ini, Najwa berhasil menciptakan tekanan diskursif tanpa harus menggunakan bahasa konfrontatif.

Sebaliknya, Prabowo Subianto cenderung menggunakan bahasa normatif dan institusional. Istilah seperti *wewenang yang cukup, menilai secara arif, dan kepentingan masyarakat* digunakan untuk menegaskan posisi negara sebagai pihak yang rasional dan bertanggung jawab. Bahasa ini berfungsi meredam kritik dengan menampilkan kebijakan sebagai sesuatu yang wajar dan diperlukan.

Perbedaan strategi kebahasaan tersebut menunjukkan bahwa dimensi teks menjadi arena awal pertarungan makna. Bahasa tidak hanya menyampaikan pesan, tetapi juga membentuk cara audiens memahami persoalan RUU Polri.

#### **Analisis Praktik Diskursif: Pengendalian Topik dan Negosiasi Makna**

Pada tingkat praktik diskursif, peran Najwa Shihab sebagai pewawancara sangat menentukan arah dialog. Najwa tidak berhenti pada satu pertanyaan, melainkan melakukan pengulangan dan pendalaman isu ketika jawaban yang diberikan belum menyentuh substansi persoalan. Strategi *follow up* ini terlihat ketika Najwa kembali menanyakan secara langsung apakah kepolisian perlu diperluas kewenangannya atau justru pengawasannya yang harus diperkuat.

Pengendalian alur percakapan ini menunjukkan bahwa media memiliki kekuasaan diskursif yang signifikan. Meskipun Prabowo Subianto memiliki otoritas struktural sebagai presiden, Najwa memiliki kuasa simbolik untuk menentukan fokus isu dan menjaga agar diskusi tetap berada pada kepentingan publik.

Prabowo merespons tekanan diskursif tersebut dengan strategi pengalihan dan penjelasan panjang mengenai sistem politik, mekanisme kerja lembaga negara, serta pentingnya stabilitas. Strategi ini menunjukkan upaya negara untuk mempertahankan legitimasi dengan menekankan proses dan prosedur, bukan menjawab kritik secara langsung. Praktik diskursif semacam ini mencerminkan bagaimana kekuasaan dijaga melalui pengelolaan wacana.

### **Analisis Praktik Sosial: Wacana Keamanan dan Demokrasi**

Pada dimensi praktik sosial, dialog ini merefleksikan kondisi demokrasi Indonesia yang tengah dihadapkan pada dilema antara kebutuhan akan keamanan dan tuntutan akan transparansi serta akuntabilitas. Wacana keamanan yang disampaikan oleh Prabowo menempatkan negara sebagai pelindung masyarakat dari ancaman kriminalitas dan narkoba. Dalam kerangka ini, perluasan kewenangan aparat diposisikan sebagai kebutuhan objektif.

Sebaliknya, wacana yang dibangun oleh Najwa Shihab menekankan pentingnya pengawasan dan partisipasi publik sebagai bagian dari prinsip demokrasi. Pertarungan dua wacana ini menunjukkan bahwa kebijakan negara tidak pernah lepas dari kontestasi makna di ruang publik.

Dialog Najwa dan Prabowo dengan demikian tidak hanya membahas RUU Polri secara teknis, tetapi juga merepresentasikan relasi kekuasaan antara negara dan warga. Media berperan sebagai ruang perantara di mana kedua kepentingan tersebut dipertemukan dan diperdebatkan.

### **Implikasi Hasil Analisis**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa talkshow politik memiliki fungsi strategis dalam menjaga keseimbangan kekuasaan. Bahasa yang digunakan dalam dialog politik dapat menjadi alat legitimasi, tetapi juga sarana kritik dan kontrol. Oleh karena itu, kemampuan masyarakat untuk memahami dan menafsirkan wacana media secara kritis menjadi sangat penting.

Pembahasan yang panjang dan naratif ini menegaskan bahwa kekuasaan dalam wacana politik bersifat dinamis dan selalu terbuka untuk dipertanyakan. Melalui dialog yang ditampilkan media, masyarakat dapat melihat secara langsung bagaimana kebijakan negara dinegosiasikan melalui bahasa.

### **Simpulan**

Dialog antara Najwa Shihab dan Prabowo Subianto tentang RUU Polri menunjukkan bahwa dinamika kekuasaan dalam wacana politik media berlangsung secara kompleks dan berlapis. Kekuasaan direpresentasikan melalui bahasa yang digunakan untuk mempertahankan maupun menantang legitimasi kebijakan negara. Analisis Wacana Kritis terbukti efektif dalam mengungkap relasi kuasa yang tersembunyi di balik praktik komunikasi politik.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam kajian bahasa, media, dan

politik, serta mendorong masyarakat untuk lebih kritis dalam menyikapi wacana politik yang disajikan media.

---

## Daftar Pustaka

- Habermas, J. (2020). *The new structural transformation of the public sphere*. Cambridge: Polity Press.
- Couldry, N. (2021). *Media, voice, and power*. Cambridge: Polity Press.
- Eriyanto. (2021). *Analisis wacana: Pengantar analisis teks media*. Yogyakarta: LKiS.
- Mulyana, D. (2021). *Ilmu komunikasi: Suatu pengantar*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Van Dijk, T. A. (2021). *Discourse and power*. London: Palgrave Macmillan.
- Wodak, R. (2021). *The politics of fear: What right-wing populist discourses mean*. London: Sage.
- Anwar, K. (2022). Wacana politik dan representasi kekuasaan di media massa. *Jurnal Komunikasi Politik*, 7(1), 45–58.
- Norris, P. (2022). *In praise of skepticism: Trust but verify*. Oxford: Oxford University Press.
- Heryanto, A. (2023). Media, demokrasi, dan politik kekuasaan di Indonesia kontemporer. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 27(1), 1–15.
- Kusuma, A., & Lestari, S. (2023). Talkshow politik dan pembentukan opini publik di era digital. *Jurnal Komunikasi Massa*, 9(2), 89–104.
- Prasetyo, B. (2024). Kekuasaan simbolik dan wacana negara dalam media televisi. *Jurnal Linguistik Kritis*, 11(1), 33–49.
- Rahmawati, D., & Fadli, M. (2024). Analisis wacana kritis dalam komunikasi politik Indonesia. *Jurnal Bahasa dan Media*, 6(1), 55–70.